

Dana Bagi Hasil SDA dan Penanggulangan Kemiskinan

(Aceh Utara, Indragiri Hulu, Kutai Kartanegara, Bojonegoro, Sumbawa Barat)

Oleh:

Meliana Lumbantoruan

Program Manager - PWYP Indonesia

Publish 
What You Pay
INDONESIA

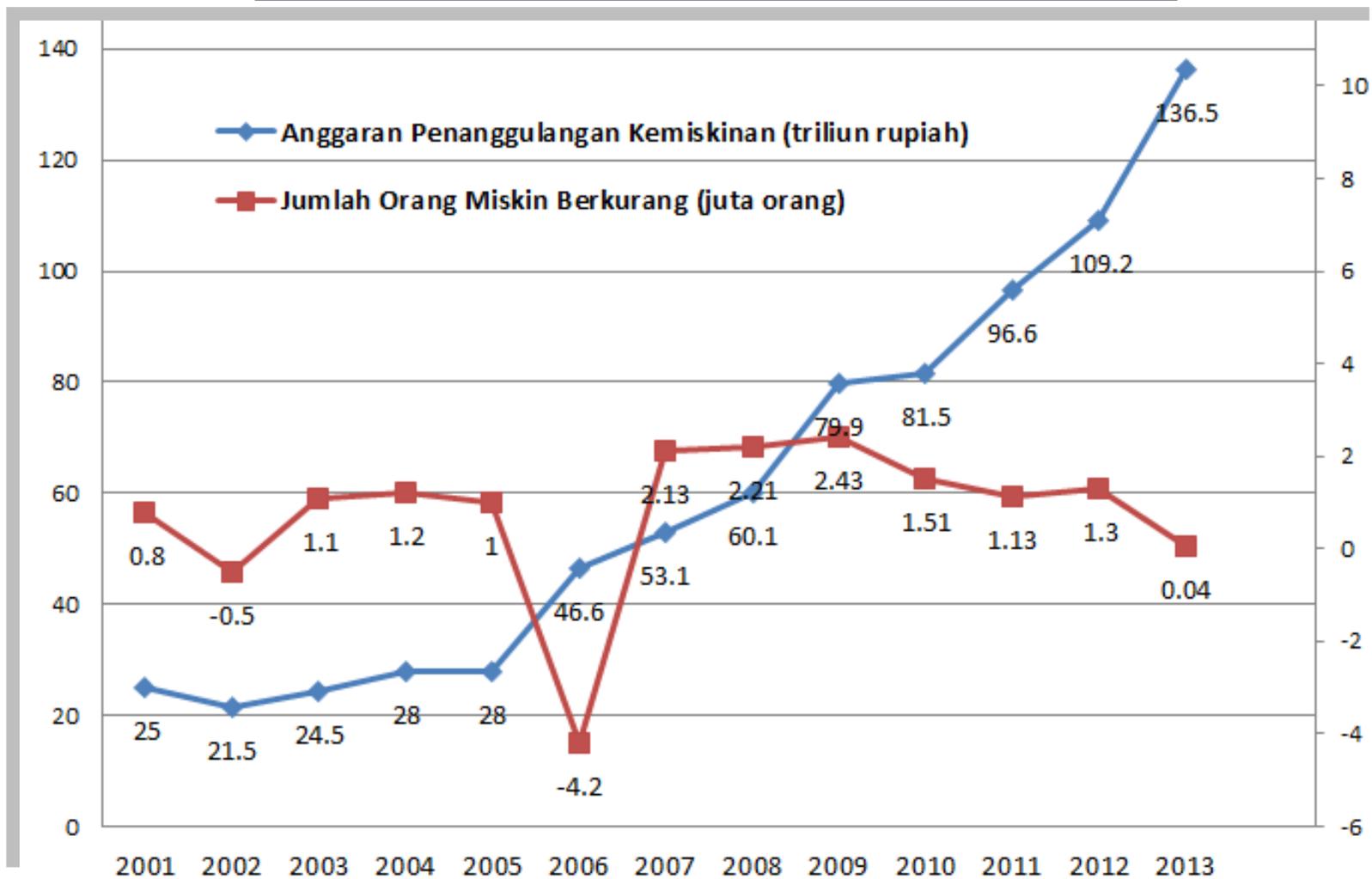
Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Ekstraktif untuk Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

- Penelitian Bank Dunia (2014) menunjukkan **antara tahun 1999 hingga 2012, tingkat kemiskinan turun separuh dari 24% menjadi 12%** → Tetapi, **65 juta penduduk masih hidup di antara garis kemiskinan nasional (\$1,25 per hari) dengan garis kemiskinan global (\$2 per hari)**
- Pada **tahun 2001**, alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan sebesar **Rp25 triliun** sedangkan jumlah penurunan penduduk miskin sebanyak **800 ribu jiwa** → Sedangkan, **pada tahun 2013**, alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan mencapai **Rp136,5 triliun** sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin hanya mencapai **40 ribu jiwa**.
- **Setelah era desentralisasi**, alokasi dana transfer ke daerah **meningkat sebesar 20,6%** dibandingkan **sebelum penerapan desentralisasi** tahun 2000, alokasi dana transfer ke daerah **baru sekitar 12,9%**.
- Kemiskinan terjadi justru di daerah – daerah kaya SDA seperti Bojonegoro, Aceh Utara, Sumbawa Barat dll, padahal DBH SDA besar dan ruang fiskal untuk program penanggulangan kemiskinan tersedia.



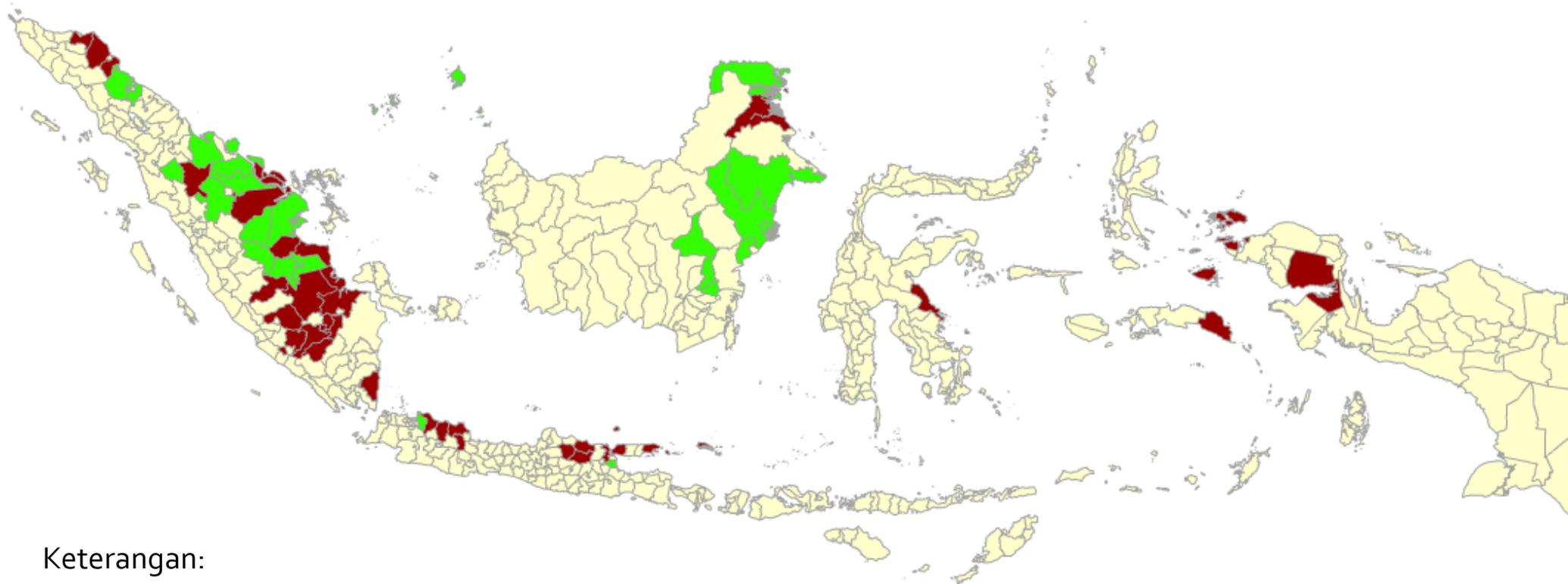
ANGGARAN BESAR vs EFEKTIVITAS



Sumber: PWYP (diolah dari Data Kemiskinan BPS dan Kemenkeu, 2001 – 2013)



KEMISKINAN DI BEBERAPA DAERAH KAYA SDA



TUJUAN PENELITIAN

- Menganalisis efektifitas DBH – SDA terhadap penanggulangan kemiskinan di lima kabupaten yang memiliki potensi SDA yang besar.
- Mempelajari kebijakan pengelolaan DBH – SDA dan program penanggulangan kemiskinan di lima kabupaten yang kaya SDA.
- Memberikan rekomendasi kebijakan fiskal terutama DBH – SDA terhadap efektifitas penanggulangan kemiskinan di Indonesia.



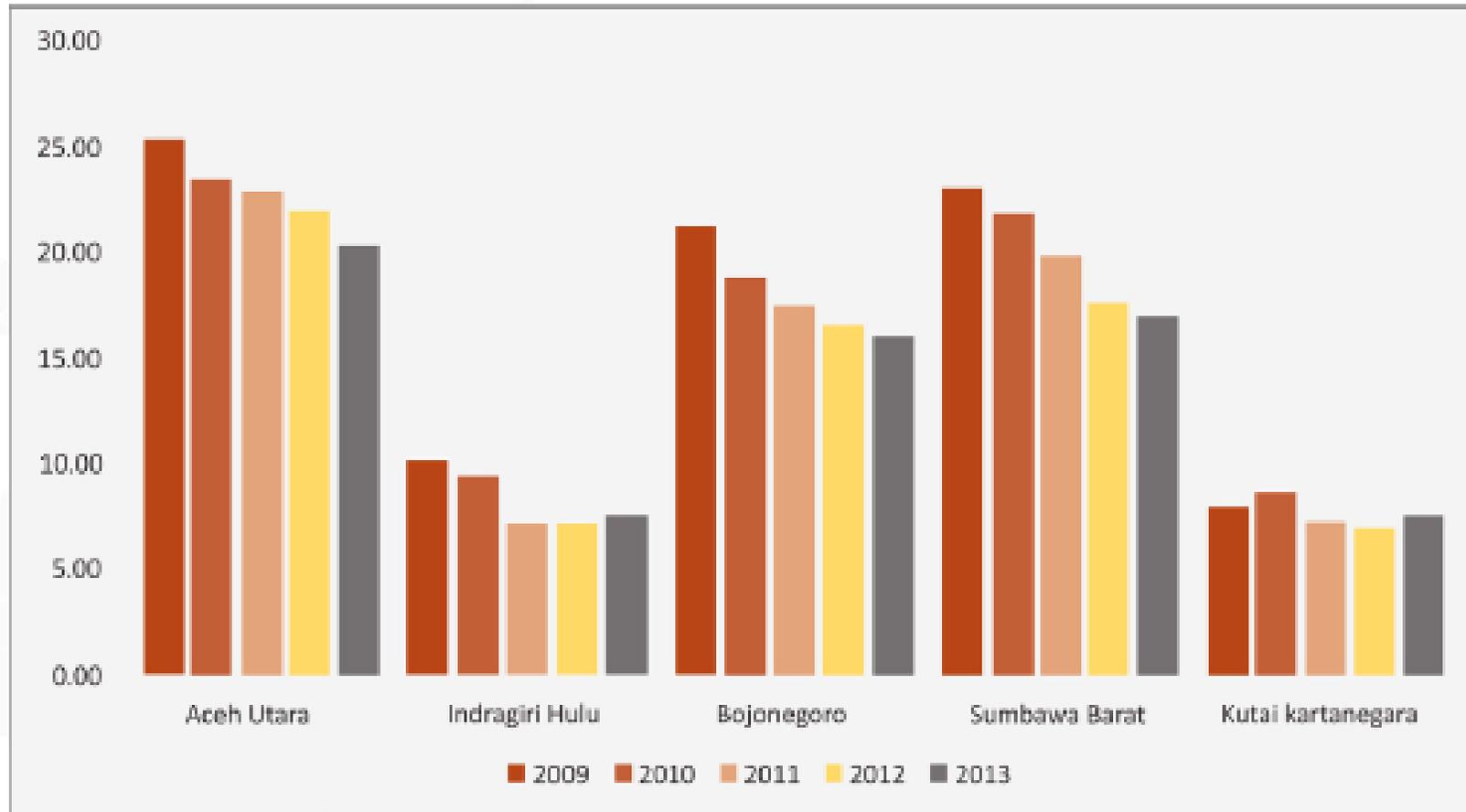
METODE PENELITIAN

- Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengambilan data primer dilakukan melalui FGD dan Indepth Interview yang melibatkan:
 - a. pengambil kebijakan terkait sektor SDA
 - b. perencanaan dan penganggaran daerah
 - c. sektor pelayanan publik dasar
 - d. Sektor pembangunan social
 - e. Masyarakat penerima program kemiskinan (sekitar tambang)
- Data sekunder berupa data DBH SDA, Kemiskinan, alokasi belanja perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari tahun 2009 – 2013



HASIL & ANALISA

Perkembangan Angka Kemiskinan di Lima Kabupaten, 2009-2013

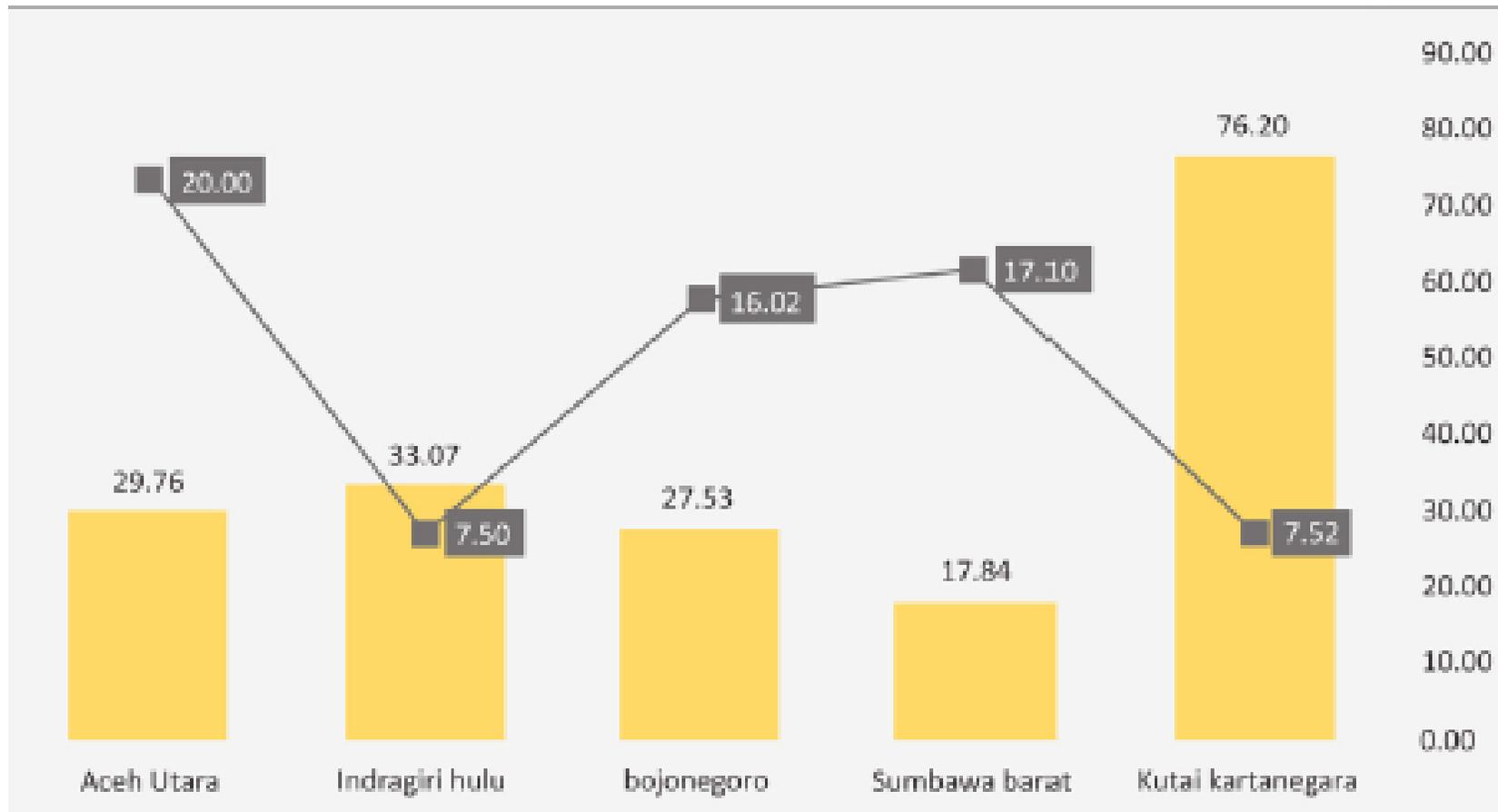


Sumber: PWYP Indonesia, 2015 (diolah dari BPS)



DBH SDA dan KEMISKINAN

Kontribusi DBH SDA terhadap Penerimaan Daerah dan Angka Kemiskinan di Lima Kabupaten (2013)



Sumber: PWYP Indonesia, 2015 (diolah dari BPS dan Kementerian Keuangan)



ALOKASI BELANJA

Alokasi Belanja Daerah berdasarkan Fungsi di Lima Kabupaten, 2013

Kabupaten	Alokasi Belanja menurut Fungsi		
	Belanja untuk Perlindungan Sosial (%)		
	Belanja untuk Modal Manusia (%)	Belanja Fisik (%)	Belanja untuk Perlindungan Sosial (%)
Aceh Utara	47.19	23.75	0.97
Indragiri Hulu	36.40	34.65	1.41
Bojonegoro	49.94	24.83	1.26
Sumbawa Barat	29.59	50.28	0.79
Kutai Kartanegara	26.29	43.16	2.29

Sumber: PWYP Indonesia (diolah dari DJPK Kementerian Keuangan)



EFEKTIVITAS ANGGARAN & PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan dan Komponen Biaya Penanggulangan Kemiskinan per Penduduk Miskin

Tahun	Total Anggaran (Rp)	Penambahan / (Pengurangan) Anggaran (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin	Penambahan/ (Pengurang- an) Penduduk Miskin	Komponen Biaya Penanggulangan Kemiskinan/ Penduduk Miskin (Rp)
Aceh Utara	71.409.615.252	50.552.666.502	122.200	(800)	584.366
Indragiri Hulu	154.334.975.887	134.951.306.394	27.200	(800)	5.674.080
Bojonegoro	121.008.899.101	19.201.856.744	203.900	2.000	593.471
Sumbawa Barat	255.157.214.620	191.533.135.438	21.700	300	11.758.396
Kutai Kartanegara	na	na	46.800	(300)	na

Sumber: PWYP Indonesia, 2015 (diolah dari laporan riset daerah)



MASALAH UTAMA KEMISKINAN DI DAERAH

KABUPATEN	MASALAH UTAMA KEMISKINAN DI DAERAH								
	Pendidikan yang Rendah	Kesehatan yang Rendah	Infrastruktur yang Buruk	Infrastruktur yang Buruk Topografi Daerah yang Sullit	Kekurangan Modal Usaha	Disabilitas	Faktor Budaya Masyarakat	Pengaruh Perubahan Ekonomi Makro	Perubahan Struktur Perekonomian Daerah
Kutai Kartanegara	V		V	V	V	V	V		
Indragiri Hulu	V	V	V		V				V
Sumbawa Barat	V			V			V	V	V
Aceh Utara	V	V	V		V			V	
Bojonegoro	V	V			V			V	

Sumber: PWYP Indonesia (diolah dari FGD di Lima Kabupaten)



KENDALA OPTIMALISASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KABUPATEN	PENYEBAB PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KURANG OPTIMAL				
	Masalah Databa- se Kemiskinan	Program yang Tumpang Tindih	Sasaran dan Tujuan Program yang Kurang Jelas	Sosialisasi Program yang Kurang	Kapasitas Anggaran yang Kurang
Kutai Kartanegara	V	V			V
Indragiri Hulu	V	V	V	V	
Sumbawa Barat	V	V		V	V
Aceh Utara	V	V	V	V	V
Bojonegoro	V	V	V		

Sumber: PWYP Indonesia (diolah dari FGD di Lima Kabupaten)



AKSES MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KEMISKINAN

Masalah Utama dan Hambatan Akses Masyarakat Miskin terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan di Lima Kabupaten

Kabupaten	Penetapan Masyarakat Miskin Penerima Program	Program yang Tidak Sesuai dengan Kebutuhan	Ketidaksesuaian antara Rencana Program dengan Implementasi	Diskriminasi (sosial, kultural dan lainnya)	Kurangnya Sosialisasi terhadap Program
Kutai Kartanegara	V			V	
Indragiri Hulu	V	V	V	V	V
Sumbawa Barat	V	V	V		V
Aceh Utara	V	V	V	V	V
Bojonegoro	V	V	V	V	V

Sumber: PWYP Indonesia (diolah dari FGD di Lima Kabupaten)



KENDALA ALOKASI DBH SDA BAGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KABUPATEN	ALASAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT KURANG OPTIMALNYA PENGELOLAAN DBH SDA TERHADAP PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH				
	DBH SDA tidak Langsung bisa dialokasikan untuk Program Penanggulangan Kemiskinan	Proses Polittk Anggaran antara Eksekutif dan Legislatif	Tidak Masuk ke dalam Sektor Prioritas Pembangunan di dalam RPJMD	Keterbatasan Ruang Fiskal	Perbedaan Antara perencanaan dan Reallsasi DBH SDA menimbulkan ketidakpastian
Kutai Kartanegara	V	V	V		
Indragiri Hulu	V			V	V
Sumbawa Barat	V			V	V
Aceh Utara	V	V		V	V
Bojonegoro	V				V

Sumber: PWYP Indonesia (diolah dari FGD di Lima Kabupaten)



KESIMPULAN

- Ketergantungan daerah pada DBH SDA memberikan resiko kegagalan fiskal yang cukup besar, karena **faktor volatilitas** dari industri ekstraktif ini, baik volatil dari **sisi realisasi produksi**, maupun **harga komoditas** berbasis SDA di pasaran internasional → Ada sedikit saja gejolak seperti *lifting* migas turun, harga minyak bumi turun atau krisis makro ekonomi, maka efeknya sangat besar bagi kebijakan fiskal di daerah kaya SDA seperti di lima kabupaten tersebut.



Rekomendasi untuk pemerintah pusat:

- Kementerian keuangan harus memperbaiki mekanisme pengelolaan DBH SDA;
 - Harus ada transparansi dari formulasi perhitungan DBH SDA dengan melibatkan pemerintah daerah dan hasilnya bisa mudah di akses oleh pemerintah daerah dan publik.
 - Formulasi harus di skenariokan secara terinci dengan proyeksi yang valid. Tidak hanya satu skenario tapi juga beberapa alternatif skenario untuk mengantisipasi gap antara perhitungan pagu indikatif dengan realisasi sehingga pemerintah daerah bisa cepat dan mudah menyesuaikan dalam kebijakan perencanaan dan anggaran daerah.
 - Kementerian keuangan membuat terobosan regulasi yang mengatur pengalokasian DBH SDA bisa sampai pada level desa dan kebijakan afirmatif untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah.



Rekomendasi untuk pemerintah pusat (II)

- Pemerintah didorong untuk membuat Instruksi Presiden (Inpres) terkait Data Terpadu Kemiskinan dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan. Aturan ini bisa menjadi **payung hukum untuk memperkuat integrasi data kemiskinan dan percepatan penanggulangan kemiskinan.**
- **Pemerintah agar meninjau kembali fungsi dan peranan TNP2K** dalam aspek penanggulangan kemiskinan, karena masih belum optimal memperbaiki sinergi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tim koordinasi dibutuhkan tapi harus diperkuat kewenangannya **bukan sekedar mengkoordinasikan program tapi juga bisa mengintervensi program-program penanggulangan kemiskinan yang ada** di tingkat Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah.
- **Pemerintah perlu mendesain DAK untuk penanggulangan kemiskinan yang sifatnya *bottom up* sesuai kebutuhan daerah dan karakteristik kemiskinan di daerah.** Ini bermanfaat untuk mengatasi soal tumpang tindih program antara pusat dan daerah, dan mengatasi masalah gap antara program yang direncanakan dengan kebutuhan dari masyarakat miskin.



Rekomendasi untuk pemerintah daerah:

- Pemerintah daerah didorong untuk membuat **regulasi (peraturan daerah) terkait Pengelolaan DBH SDA dan penanggulangan kemiskinan berbasis desa.**
- **Pemerintah daerah harus memiliki data terpadu kemiskinan sampai pada level desa.** Ini penting untuk melakukan sinergi program penanggulangan kemiskinan di daerah.
- Melibatkan Masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, tidak hanya sebagai objek dalam program.
- **Memperkuat peranan TKPKD bukan sekedar tim koordinasi tapi juga bisa melakukan intervensi** terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap SKPD serta memperluas cakupan tim sampai pada level pemerintah desa.
- **Pemerintah daerah harus membuat *road map* terkait optimalisasi DBH SDA terhadap pembangunan daerah.** Ini menjadi panduan bagi pengambil kebijakan untuk **memanfaatkan DBH SDA untuk pembangunan dan menjadi solusi alternatif untuk menghindari ketergantungan daerah terhadap DBH SDA.** Dimana *Roadmap* tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD.



TERIMA KASIH

Sekretariat PWYP Indonesia
Jalan Tebet Timur Dalam VIIIK No.12
TEBET – JAKSEL
021-29069727
meliana@pwyp-Indonesia.org
sekretariat@pwyp-Indonesia.org
www.pwyp-Indonesia.org

